

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah jaman keterbukaan sekarang ini, masyarakat mengalami perubahan terutama menilai kenyataan yang melingkup kehidupannya. Kenyataan ini tidak hanya dimiliki oleh setiap individu saja, melainkan juga dimiliki oleh instansi pemerintah terutama pemerintah daerah. Sekarang banyak pemerintah menuntut banyak keadilan, kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah ataupun pemerintah kota sejak orde baru hanya dijadikan lahan kerukan bagi tingkat pusat, hal ini terbukti dengan banyaknya sumber-sumber pendapatan yang seharusnya potensial bagi daerah, ternyata menjadi hak pemerintah pusat. Sumber-sumber pendapatan yang diserahkan kepada daerah terlalu sedikit, tentu saja daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan.

Dalam seluruh proses pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap pengendalian dan pengawasan, administrasi pemerintahan memegang peranan penting, karena keterlibatan pemerintah dalam proses pembangunan dengan sistem administrasi.

Otonomi daerah merupakan fenomena politik yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi, demokrasi. Saat ini bangsa dan negara kita membutuhkan manusia-manusia yang bermental pembangunan yang kreatif. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang senantiasa diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreatifitasnya.

Tujuan pemberian otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, serta undang-undang no.25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ini dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan otonomi luas bagi daerah kabupaten, pembangunan dan kemasyarakatan harus dengan matang direncanakan untuk kemudian dilaksanakan dan diawasi kemudian pelaksanaan program tersebut dievaluasi kembali agar tercapai apa yang telah direncanakan semula.

Keinginan pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian, terutama dalam mengelola sumber daya yang ada, dapat menentukan kebijakannya sendiri, mempotensialkan seluruh aparatur daerah agar bisa mandiri dan mempunyai profesionalitas yang tinggi serta menjamin pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Hal ini penting dikarenakan hanya pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kemampuan yang ada didalam masyarakat dan lebih mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Potensi kebutuhan dan dinamika masyarakat justru terletak dipemerintahan daerah, untuk itu sudah sepatutnyalah daerah harus diberi ruang gerak yang cukup memadai mengembangkan prakarsa dalam pelayanan terhadap masyarakat dan mendorong masyarakat dalam pembangunan daerahnya.¹

Selain itu, arti penting dari kecamatan itu sendiri sangatlah besar. Camat sebagai pemimpin kecamatan memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan revisinya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa camat sebagai kepala wilayah kecamatan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat kecamatan berdasarkan kewenangan yang diberikan walikota.
2. Fasilitas pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat kecamatan.
3. Penyelenggaraan pembinaan kelurahan, ketentraman dan ketertiban.
4. Fasilitas lembaga kemasyarakatan.
5. Penyelenggara pelayanan umum.
6. Penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.³

Melihat arti pentingnya kecamatan, untuk itu pemerintah daerah harus dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakatnya melalui pemberdayaan kecamatan. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak yang dalam hal ini kantor Kecamatan, agar penyelenggaraan administrasi kecamatan dapat berjalan dengan baik dan efektif, ini memang memerlukan perhatian yang lebih agar semua ini dapat tercapai. Pembinaan terhadap aparatur pemerintah harus dilakukan oleh camat maupun semua pihak yang terkait terhadap kemajuan aparatur pemerintah kecamatan dibidang pemerintahan, supaya kantor kecamatan dapat melakukan kewajiban dan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat, sehingga aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat dapat terpenuhi.

³ UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004.

Namun, kenyataan dilapangan masih sangat jauh dari yang diharapkan dan belum sesuai dengan tuntutan reformasi yang menginginkan adanya partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan akuntabel. Kinerja dari organisasi beserta aparat kecamatan yang masih belum mencerminkan sebuah organisasi atau seorang pegawai pemerintahan yang tugasnya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat selain menjalankan roda pemerintahan. Contoh: dalam hal ini masih belum berhasilnya pihak kecamatan (Pangkalbalam) dalam mengatur SDM pegawainya, serta pembuatan laporan tahunan yang asal jadi hingga kepada perilaku buruk yang tercermin dari para pegawai kecamatan seperti datang kantor yang molor (korupsi waktu) dan berbagai permasalahan lain yang tampaknya sekarang telah membudaya di masyarakat kita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penyusun melakukan suatu rumusan masalah, sebagai berikut :

“Bagaimanakah kinerja kantor kecamatan Pangkalbalam, di kota Pangkalpinang Tahun 2003-2004?”

C. Kerangka Dasar Teori

Merupakan uraian yang menjelaskan atau memaparkan variabel-variabel dan hubungan yang terjalin antara variabel dengan berdasarkan pada konsep definisi tertentu. Pada bagian kerangka dasar teori ini dikemukakan teori-teori yang menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.⁴ Pentingnya peranan teori tersebut, karena peneliti mencoba menerangkan suatu fenomena alami yang menjadi focus atau pusat perhatiannya secara lebih mendalam.

Sehingga menurut definisi ini teori mengandung tiga hal, antara lain :

1. Serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan.
2. Menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaiman hubungan antar konsep.
3. Menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan anatar konsep..

Dengan demikian didalam penelitian ini dasar-dasar teori yang akan dikemukakan adalah, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Organisasi Pemerintahan Daerah

a. Organisasi

Organisasi merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatau ikatan hirarki dimana selau terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dengan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.⁵

Organisasi dapat didefinisikan dalam arti badan maupun bagan. Organisasi dalam arti badan ialah sekelompok rang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu Sedangkan organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan dan kerjasama dari orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan.

Beberapa penulis mengemukakan bahwa organisasi memiliki tiga ciri khas, yaitu :

- 1) Ada sekelompok orang.
- 2) Kerja sama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.
- 3) Terjadi kerja sama antar orang atau sekelompok orang.

Secara umum organisasi memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

- 1) Organisasi adalah lembaga sosial yang terdiri dari sekumpulan orang dengan beberapa pola interaksi yang ditetapkan.
- 2) Organisasi dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sebagai kreasi sosial yang memerlukan aturan.
- 3) Organisasi dikoordinasi dan dengan sengaja disusun agar kegiatan-kegiatan dapat dikoordinasi menurut pola yang logis.
- 4) Organisasi sebagai instrumen sosial mempunyai batasan yang secara relatif dapat didefinisikan dan keberadaannya mempunyai basis yang relatif permanen.

b. Manajemen Organisasi

Istilah manajemen datang dari bahasa inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *ménage* yang berasal dari bahasa Latin

manajemen bisa diartikan sebagai mempelajari bagaimana menciptakan usaha yang *efektif* (“doing right things”) secara *efisien* (“doing things right”) dan *produktif*, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Maka dapat diperjelas bahwa manajemen organisasi adalah menciptakan usaha yang efektif secara efisien dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen dari organisasi kecamatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha yang efektif secara efisien dan produktif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan di wilayah kecamatan.

Adapun ruang lingkup dari manajemen organisasi kecamatan (pemerintahan) terlihat dari fungsi-fungsi manajemen yaitu sebagai berikut :

- 1) Perencanaan organisasi kecamatan/ pemerintahan
- 2) Pengorganisasian sumber-sumber organisasi kecamatan/ pemerintahan
- 3) Penggunaan sumber-sumber organisasi kecamatan/ pemerintahan
- 4) Kontrol organisasi kecamatan/ pemerintahan.

Fungsi yang berjalan tersebut merupakan proses. Setiap proses meliputi *input* (IP), *throughput* (TP), dan *output* (OP). Penggunaan *output* menimbulkan *outcome* (OC). IP, TP, OP dan OC

c. Pemerintah Daerah

Dalam undang-undang No.22 tahun 1999, daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang dilingkupinya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara sebagai suatu organisasi yang besar tersusun atas satu pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah. Secara garis besar, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala administrasi pemerintahan daerahnya kepada Pemerintah Pusat. Sebaliknya, Pemerintah pusat juga berkewajiban untuk memberikan pembinaan atau bimbingan bahkan bantuan terutama yang berupa materil Kepada pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan wilayahnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah digunakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan buat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

perencanaan dari pimpinan daerah, baik menghadapi masalah-masalah serta pengambilan langkah-langkah pemecahannya. Pemimpin daerah yang dinamis akan dapat menggairahkan partisipasi dan menciptakan iklim bagi pertumbuhan daerah.⁷

2. Reformasi Organisasi Pemerintahan Daerah

Reformasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi didalam ruang lingkup sebuah sistem, namun sistem yang telah ada itu tidak dirubah atau diganti secara menyeluruh melainkan hanya pergantian pada sub-sub sistemnya saja, perubahan ini dilakukan hanya dalam skala yang kecil saja dan perubahan ini berjalan secara lambat.

Dalam bidang pemerintahan, masyarakat luas menuntut pemerintah pasca orde baru untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas dan efisiensi, keadilan dan penegakkan hukum yang selama ini ternyata gagal diwujudkan oleh rezim ode baru. Kegagalan tersebut bahkan sering dianggap sebagai sebab dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu praktek penyelenggaraan pemerintah yang selama ini jauh dari prinsip dan norma efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik tidak dapat lagi dipertahankan. Untuk itu reformasi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi dan pemerintahan diperlukan dan dengan demikian reformasi tata pemerintahan menjadi agenda kebijakan yang tidak terhindarkan⁸.

⁷ Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Thun 1999, *Pemerintah Daerah*, Hal 53

⁸ Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003. Hal 1.

Dengan demikian reformasi organisasi pemerintahan daerah merupakan suatu bentuk perubahan yang dilakukan pada sebuah sistem yang berskala kecil di tingkatan organisasi pemerintahan daerah, baik itu dari segi sumber daya manusianya maupun dalam hal perumusan kebijakan dari suatu pemerintahan daerah. Ini dilakukan untuk dapat menjadikan pemerintah daerah sebagai alat untuk pencapaian tujuan negara dan menjadikan pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah

a. Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah:

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat pula diartikan sebagai hasil, kerja yang mampu dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang tergabung dalam suatu instansi atau organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau instansi secara legal dan sesuai dengan moral dan etika⁹. Dalam suatu organisasi atau instansi yang memiliki banyak anggota, kinerja setiap anggota dapat mempengaruhi kinerja organisasi atau kinerja instansi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja organisasi atau instansi yang berkualitas, maka kinerja dari para anggota yang terlibat dalam organisasi atau instansi perlu ditingkatkan terlebih dahulu.

Kinerja seseorang atau instansi perlu dilakukan evaluasi, sehingga dapat diketahui tercapai tidaknya tujuan instansi dan efektif tidaknya proses kerja yang berlangsung dalam instansi terutama instansi pemerintah. Istilah evaluasi dalam modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis¹⁰.

Adapun karakteristik evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:

1) Fokus Nilai

Selain ditujukan kepada pemberian nilai dari suatu pelaksanaan tugas atau pekerjaan, evaluasi kinerja ini lebih ditekankan atau ditujukan untuk menentukan manfaat dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seseorang atau instansi dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu hal. Pada umumnya ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pelaksanaan tugas merupakan hal yang perlu dijawab, oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2) Interpendensi fakta nilai

Suatu hasil evaluasi kinerja tidak hanya tergantung kepada fakta semata, namun juga terhadap nilai. Untuk memberi pernyataan

¹⁰ ... "Indikator kinerja Pemerintah Daerah, Pendapat Manajemen dan

bahawa pelaksanaan tugas atau pekerjaan dalam instansi telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal harus didukung dengan bukti-bukti, bahwa hasil pelaksanaan tugas tersebut merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi atau memecahkan masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan persyaratan yang penting bagi evaluasi kinerja.

3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Evaluasi kinerja diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan yang diperoleh dari masa lalu. Evaluasi kinerja tidak berkaitan dengan hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang.

4) Dualitas Nilai

Evaluasi kinerja dipandang sebagai tujuan sekaligus cara sehingga nilai yang ada dalam suatu evaluasi kinerja mempunyai kualitas ganda. Selanjutnya evaluasi kinerja dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada didalam pelaksanaan tugas dan ada juga yang dianggap sebagai intrinsik (diperlukan dalam tubuh instansi) ataupun ekstrinsik (diperkan karena mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain).

b. Aspek-aspek Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Dalam menentukan ukuran kinerja organisasi publik tidak semudah dalam mengukur kinerja organisasi swasta atau privat. Pada organisasi Privat, kinerja dapat diukur melalui kemampuan produksi, keuntungan yang diraih, efisiensi biaya dan efektivitas serta

dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi.

3) Profesionalisme

Aspek profesionalisme menunjukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4) Akuntabilitas

Aspek ini diartikan sebagai pertanggungjawaban dari para aparatnya tentang apa yang telah dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah kepada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau memiliki kepentingan dengan kabupaten khususnya. Salah satu cara untuk mengukur akuntabilitas tersebut adalah melaksanakan rapat koordinasi serta evaluasi dari setiap kegiatan yang sedang atau yang telah dilakukan oleh organisasi, karena hal tersebut akan menjadi bahan koreksi bagi organisasi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dalam meningkatkan kualitas.¹⁴

¹⁴ Pribadi Ulung, *Perubahan Paradigma organisasi, Perencanaan Strategis Manajemen Total Kualitas dalam Pengembangan Organisasi*, (Diktat Mata Kuliah Pengembangan Organisasi dan Manajemen, Fakultas Pendidikan Manajemen dan Administrasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta).

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Kegunaan Penilaian Kinerja:

- 1) Menilai kualitas, kuantitas dan efisiensi pelayanan.
- 2) Memotivasi birokrasi pelaksana.
- 3) Memonitor para kontraktor.
- 4) Melakukan penyesuaian anggaran (budget).
- 5) Mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
- 6) Menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Penyebab kesulitan dalam pengukuran kinerja adalah:

- 1) Tujuan dan misi organisasi pelayanan publik sangat kabur bersifat multidimensional.
- 2) Stakeholders (pengambil kebijakan) jauh lebih banya dan komplek dari pada orang swasta.
- 3) Stakeholders sering memiliki kepentingan yang berbentuk antara satu dengan yang lain.

Permasalahan penilaian kinerja Pemda:

Aparat Pemda hanya mengetahui:

- 1) Peraturan perundangan yang didirikannya pemda.

- 3) Metode operasi, penunjuk pelaksanaan dan teknis
- 4) Garis koordinasi tertentu.

Mereka tidak memahami:

- 1) Apakah pemda sebagai organisasi publik di daerah telah berhasil mencapai tujuan.
- 2) Apakah kinerja pemda cukup berhasil.¹⁵

c. Fungsi Evaluasi Kinerja

- 1) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi, seberapa jauh target yang sudah tercapai.
- 2) Memberikan masukan (klarifikasi dan kritik sebagai umpan balik) Untuk mengetahui permasalahan yang ada (reformulasi alternatif kebijakan atau program kebijakan telah mencapai hasil maksimal atau minimal harus didukung dengan bukti-bukti).

Standarisasi indikator kinerja, langkah ini adalah menetapkan standar capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja untuk setiap periode tertentu (lima tahunan, tiga tahunan, satu tahunan).

Kriteria standar kinerja yang baik

- 1) Attainable : Dapat dicapai pada situasi dan kondisi tertentu
- 2) Ekonomis : Biaya rendah

- 3) Aplicable : Dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada
- 4) Konsisten : Kepatuhan pada semua
- 5) All-inclusive : Komprehensif, menyeluruh, semua aktifitas saling berkaitan.
- 6) Understandable : Dapat dimengerti, mudah dan jelas.
- 7) Measurable : Dapat diukur, tepat.
- 8) Stabil : Dapat teruji pada jangka waktu yang cukup.
- 9) Adaptable : Dapat diadaptasikan akan disesuaikan (ditambah, dirubah atau dibuat sendiri).
- 10) Legitimasi : Hasil consensus dan resmi disetujui.
- 11) Equitable : Seimbang, dapat digunakan sebagai pembandingan dapat dinilai orang lain
- 12) Fokus pada stakeholders : Orientasi hasil untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan stakeholders.

4. Kecamatan

a. Pengertian

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan : Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Menurut UU No. 5 tahun 1974, Kecamatan dijadikan sebagai

undang-undang No.22 tahun 1999 diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya undang-undang ini mengatur secara khusus tentang Kecamatan yaitu pada pasal 66 yang menyebutkan:

- 1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah kabupaten dan Daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
- 2) Kepala Kecamatan disebut Camat.
- 3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
- 4) Camat menerima pelimpahan wewenang, sebagian wewenang dari Bupati/Walikota.
- 5) Camat Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
- 6) Pembentukan Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah.

Sebagi undang-undang tentang pemerintahan Daerah, undang-undang ini tidak banyak mengatur tentang Kecamatan. Hal ini dapat dipahami karena pengaturan tentang bagaimana kecamatan, apa tugas-tugas kecamatan, dan bagaimana sebuah kecamatan baru dibentuk itu semua diserahkan kepada daerah dengan pembuatan Peraturan Daerah.

b. **Kedudukan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

kedudukan Kecamatan sebagai wilayah administrative dibawah Kabupaten/Kotamadya sering menjadi perdebatan diantara berbagai

ini disebabkan karena kedudukan Kecamatan yang selama ini merupakan wilayah administratif yang berarti merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, ternyata dalam praktek tidak demikian. Hal ini disebabkan kedudukan Kecamatan yang berada dibawah kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II tidak terlepas dari tugas-tugas pemerintah daerah otonom yang diemban oleh kepala daerah tingkat II yang melekat pada diri Bupati/Walikota. Akibatnya Camat sebagai kepala administrative tingkat Kecamatan lebih banyak melaksanakan tugas-tugas untuk membantu kepala daerah daripada kepala wilayah. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai polemic mengenai kedudukan Kecamatan dalam system pemerintahan daerah.

Kecamatan menurut UU No. 5 tahun 1974 adalah satuan wilayah administrative bagian dari wilayah kabupaten dan kotamadya dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, kepala kecamatan disebut Camat.

Dalam UU No. 22 tahun 1999 hal ini telah diatur dimana kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut Camat. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memnuhi syarat. Dalam hal ini Camat diberikan kedudukan sebagai perpanjangan tangan dari kepala daerah yang harus bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dikecamatan. Hal ini akan semakin

c. Peran Kecamatan

Adapun peran Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menterpadukan system pendapatan di tingkat desa/Kelurahan, mendata tentang penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan untuk menemukali potensi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi diwilayah Kecamatan.
- 3) Meningkatkan pelayanan bagi instansi atau lembaga pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.
- 4) Mendayagunakan kecamatan yang mana dapat memberi informasi kepada masyarakat, menganalisis dan menentukan potensi sehingga mengetahui tingkat perkembangan Desa/Kelurahan yang menjadi wilayahnya.

D. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah:

1. Organisasi Pemerintah Daerah

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari elemen-elemen atau unsur negara yang berada dibawah pemerintah pusat dan mengelola serta memberdayakan sumber daya dalam wilayah yang dilingkupinya.

2. Kinerja

Kinerja merupakan suatu hasil karya yang dapat dicapai oleh individu atau sekelompok individu dalam suatu organisasi yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsure penelitian yang menunjukkan cara mengukur suatu variabel, disamping itu definisi operasional juga dapat diartikan sebagai petunjuk dan pelaksana untuk mengukur suatu variabel. Terkait dengan pengertian definisi operasional tersebut, maka indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja kantor kecamatan:

1. Aspek Responsivitas

Diukur dengan Indikator:

- a. Adanya susunan tertulis program dan kegiatan yang terdapat didalam rencana strategis.
- b. Adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan

2. Aspek Profesionalisme

Diukur dengan indikator:

- a. Tinggi rendahnya jenjang atau tingkat pendidikan para pegawai.
- b. Adanya kesesuaian dalam bidang pekerjaan dan keahlian para pegawai.

3. Aspek Akuntabilitas

Diukur dengan indikator:

- a. Kelengkapan laporan pertanggungjawaban.
- b. Adanya Evaluasi kegiatan pemerintah dikantor kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.

F. Metode Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian pasti terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai baik itu bagi sipeneliti maupun semua pihak-pihak yang terkait. Adapun tujuan didalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui kinerja dari Kantor Kecamatan Pangkalbalam.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja kantor kecamatan Pangkalbalam.

2. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat baik itu bagi penulis itu sendiri maupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat, sebagai sumbangan

dan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, karena di dalam penelitian pasti terdapat hal-hal baru yang ditemui atau sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, sehingga dapat menambah wawasan, memperkaya pengetahuan dan pengalaman bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait.

3. Jenis Penelitian

Dalam Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Oleh karena itu penelitian ini hanya untuk memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan masalah yang dianalisis secara kualitatif.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian sebagai berikut:

- a. Dari segi pengenalan daerah

Penulis telah mengenal daerah tersebut, dengan demikian penyusun dapat lebih mudah melakukan penelitian efektifitas dan kinerja aparat serta efisiensi kerja yang semaksimal mungkin. Sebagaimana untuk meningkatkan produktivitas kerja disini penulis berusaha meneliti

bagaimana kinerja yang dilakukan aparat pemerintah kantor Kecamatan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang

- b. Mengetahui secara langsung kinerja yang dilakukan dikantor Kecamatan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang.

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, adapun pengertian dari data tersebut adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang ada didalam penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Kepala camat beserta aparat pemerintahannya di kantor Kecamatan Pangkalbalam.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumenter tentang daerah penelitian, buku-buku, kepustakaan, serta laporan yang ada di kantor Kecamatan Pangkalbalam (arsip-arsip Kecamatan).

6. Unit Analisis

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah Kantor Kecamatan Pangkalbalam sebagai suatu organisasi pemerintahan yang mengabdikan kepada masyarakat beserta pegawainya.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview merupakan teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan langsung terdiri dari dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dalam kedudukan yang berbeda, yaitu penulis dengan interview dengan subjek penelitian yang telah ditentukan. Disini interview dilakukan dengan kepala camat dan aparat pemerintahannya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mempelajari arsip-arsip atau catatan, monografi dan laporan-laporan yang ada dikantor Kecamatan Pangkalbalam.¹⁶

c. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti untuk mendapatkan data yang diperoleh.

8. Teknik Analisis Data

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Yang dimaksud dengan teknik analisis data kualitatif menurut Kuntjoroningrat adalah :

“Data yang dikumpulkan itu adalah berupa studi kasus dan bersifat monografis mudah diklarifikasikan dan jumlahnya sedikit.”¹⁷

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif maka data yang diperoleh dalam penelitian itu tidak dianalisa menggunakan angka-angka tetapi data yang diperoleh itu akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 bab, terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, defemisi konsepsional dan metode penelitian.

Bab II berisi mengenai deskripsi objek penelitian, yang meliputi: deskripsi wilayah, gambaran umum kota Pangkalpinang, keadaan geografis Kecamatan Pangkalbalam, penduduk, keadaan sosial ekonomi dan budaya, sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan budaya, struktur organisasi pemerintah Kecamatan Pangkalbalam serta deskripsi rencana kerja kantor Kecamatan Pangkalbalam tahun 2003-2004.

Bab III mencakup penyajian data penelitian wawancara, dokumentasi, observasi dan analisis terhadap evaluasi kinerja kantor Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tahun 2003-2004.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran